

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN
KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI MAHFUD ARYA WARDANA
NIM.10400115017

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Mahfud Arya Wardana

Nim : 10400115017

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 13 Juli 1997

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : BTN Cabalu Blok A6/6

Judul : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan
Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu
Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/
Pid.Sus /2018 /PN.Mrs)”.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, Juni 2019

Penulis

Andi Mahfud Arya Wardana
Nim. 10400115017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)”**, yang di susun oleh Saudara **Andi Mahfud Arya Wardana, NIM : 10400115017**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 M bertepatan dengan 22 Syawal 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 25 Juni 2019
22 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr.Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Tallim, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang,S.H.,M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Istiqamah,S.H,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Jumadi,S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing II	: ST.Nurjannah,S.H.,M.H	(.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr.Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, hidayah dan taufiq-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)”. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, atas junjungannya-lah kita dapat merasakan Iman Dan Islam yang sesungguhnya..

Perlu dikemukakan bahwa dalam penelitian dan pembahasan skripsi yang saya buat ini masih dalam bentuk yang sederhana, dan tidak menutup kemungkinan didalamnya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritikan positif yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ayahanda **DRS.Andi Muhammad Asri** dan Ibunda **Sitti Rukiah** yang telah menjadi motivator serta

panutan penulis dan tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Terimakasih penulis haturkan atas segala dukungan, dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis selama ini, beserta Adikku **Andi Nurul Rifqi Ardianto** yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada nenekku tersayang **Maryama** dan Para keluarga Besarku yang telah memberikan perhatian serta kasih sayangnya memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus kepada penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Pada program penyelesaian ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Musafir Pababbari,M.Si.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Beserta seluruh Wakil Rektor.
2. Bapak Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin,M.Ag.selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqomah,S.H,M.H.selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr.Rahman Samsuddin,S.H.,M.H. Selaku sekertaris Jurusan ilmu Hukum.
4. Bapak Prof.Dr.Kasjim,SH,M.Thi selaku Penasehat Akademik
5. Para segenap Dosen,Staf dan Karyawan/Karyawati atas segala kontribusi ilmiah, bimbingan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu.

6. Ayahanda Dr.Jumadi,S.H.,M.H dan Ibunda St.Nurjannah,S.H.,M.H masing-masing selaku pembimbing penyusun, yang senantiasa menyisihkan sebagai waktunya untuk efektifitas penyusunan skripsi ini sejak awal penyusunan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda Dr.Marilang,S.H.,M.Hum dan Ibunda Istiqomah,S.H.,M.H selaku penguji ujian seminar dan ujian Munaqasyah.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maros beserta Hakim dan Staf pengadilan Negeri Maros yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
9. Kepada sahabat-sahabatku(SIXBEST) yaitu Aswar,Ifan Andinata,Andi Nur Alfidah Putriansyah, Syamrianti Putri Basri, Annur Saputri atas Persaudaraan dan dukungan selama kuliah difakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Kepada Sahabat seperjuangan Muhammad Rifka Mansur, Jefri, Reza Darwis , Dedi Aswandi, Hajrawati Gama yang telah memotivasiku sampai saat ini.
11. Terimakasih Kepada keluarga dan teman-teman KKN Reguler UIN Alauddin Makassar Gelombang 60 Desa Pombakka,Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara yang telah menjadi keluarga dalam waktu singkat.
12. Kepada IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu)UIN Alauddin Makassar yang telah menjadi keluarga baru dan telah memberikan banyak pengalaman selama berorganisasi

13. KKMB(Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba) yang telah memberikan banyak pengalaman serta ilmu selama berorganisasi di UIN Alauddin Makassar.
14. Teman-teman angkatan 2015 Jurusan Ilmu Hukum (VONIS) atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Demikian kata pengantar yang penulis paparkan,atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

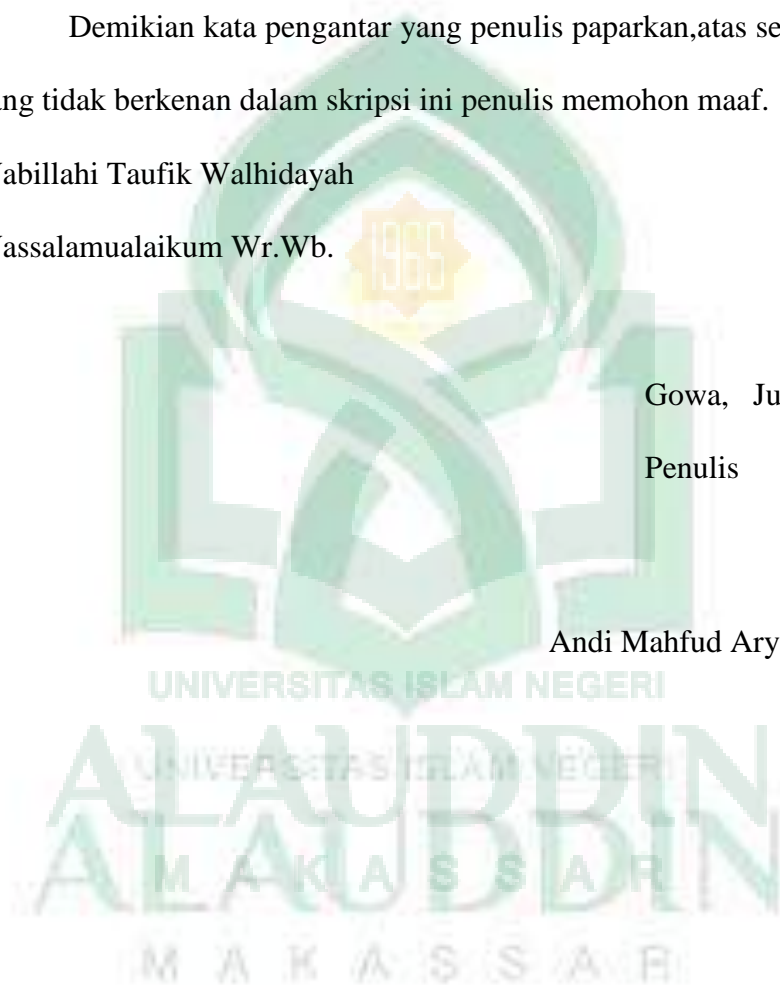
Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Gowa, Juni 2019

Penulis

Andi Mahfud Arya Wardana



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1-8
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	9-13
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	13-17
E. Tujuan Penelitian	17-18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS	19
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19-22
2. Unsur Tindak Pidana	22-31
3. Pemidanaan	31-35
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUBUHAN	35
1. Pengertian Persetubuhan	35-36
2. Undang-Undang yang mengatur terkait Persetubuhan	36-41
3. Perbedaan Persetubuhan, Pemerkosaan, dan Pencabulan	41-44
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN	44
1. Pengertian Ancaman Kekerasan Dan Kekerasan	44-45
2. Jenis-Jenis Dan Bentuk-Bentuk Kekerasan	45-49
D. TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK DAN AYAH	49

1. Pengertian Anak	49-52
2. Pengertian Ayah Tiri	53
3. Upaya Perlindungan Terhadap anak	53-56
E. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PERSETUBUHAN	56-58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN.....	59
1. Jenis Penelitian.....	59
2. Lokasi Penelitian.....	59
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	59-61
1. Pendekatan Penelitian	59-60
C. METODE PENGUMPULAN DATA.....	61
1. Metode Observasi.....	61
2. Metode Wawancara.....	61
D. INSTRUMEN PENELITIAN	61
E. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA.....	61
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK(Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)	
1. Identitas Terdakwa	62
2. Kasus Posisi	63-65
3. Dakwaan.....	64-74
4. Tuntutan	74-75
5. Amar Putusan	75-76
B. FAKTOR HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA DENGAN NOMOR PERKARA (Studi Putusan No.74/PID.SUS/2018/PN.MRS)	
1. Faktor Yang Memberatkan	84
2. Faktor Yang Meringankan	84

C. ANALISIS PENULIS	84-88
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	89
1. Kesimpulan	89-90
2. Implikasi.....	90-91
DAFTAR PUSTAKA	92-94
LAMPIRAN.....	95-106
DAFTAR RIWAYAT HDUP.....	107-108



ABSTRAK

Nama : Andi Mahfud Arya Wardana

NIM : 10400115017

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs), selanjutnya disusun ke dalam sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemaksaan anak melakukan persetubuhan disertai kekerasan oleh ayah tiri di Kabupaten Maros? 2). Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan anak melakukan persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Kabupaten Maros?

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengadilan Negeri Maros. Sumber dan jenis data yaitu Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs dan Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Maros. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun teknik analisis digunakan adalah Analisis Kualitatif.

Hasil-hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak oleh ayah tiri telah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 76 D UU RI NO.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau melanggar Pasal 46 Jo Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berupa barang bukti, keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs telah sesuai dengan KUHAP, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa ditambah dengan alat bukti yang ada pada persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa dengan memperhatikan Undang-Undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan menuangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan NO.74/Pid.Sus/2018/ PN.Mrs)”**

Indonesia merupakan negara hukum, Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 maka segala tingkah laku dan aktifitas manusia diatur oleh Hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek kehidupan manusia karena dapat dibayangkan apabila hukum tidak mengatur pola tingkah laku dan aktivitas kehidupan kita maka bagaimana jadinya kehidupan di negara kita?.

Didalam pembagian hukum Konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang pertama itu kita sebut sebagai *norma*.

Sedang akibatnya dinamakan *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat

negatif yang disebut sebagai pidana(hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi *pidana mati*.

Kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam suatu kitab undang-undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi dan unifikasi hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat tersebut, tentu dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan yang baru pula.

Sekedar perbandingan, KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan dari kolonial Belanda yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 berdasarkan *Besluit Van Strafrecht Voor Nederland Indie*. Sebagai akibat dari belum terbentuknya KUHP yang baru, maka KUHP yang berlaku sekarang sudah mulai ketinggalan Zaman. Banyak Norma dan sanksi yang tercantum didalamnya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan hukum masyarakat menghendaki lahirnya KUHP yang merupakan unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang mampu mengatur berbagai macam tindakan yang merugikan masyarakat tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Pidana.

K.Wantjik mengatakan latar belakang timbulnya tindak pidana khusus yaitu apa yang tercantum dalam KUHP tidak dapat mengetahui perkembangan

zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu perbuatan atau Undang-Undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada didalam KUHP, maka disebut Tindak Pidana diluar KUHP.¹

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-Undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP.²

Berdasarkan dari uraian diatas kasus “Tindak Pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dan tipu muslihat terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri” merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilaan dan termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang diatur dalam UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harta, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi

¹Pendapat K.Wantjik seperti dikutip Renggong Ruslan dalam bukunya, *Hukum Pidana Khusus*(Jakarta:PT.balebat Dedikasi Prima.2017),h.1-2

²Renggong Ruslan,*Hukum Pidana Khusus*,(Jakarta),h.31

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat ,pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan Yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua , keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas secara optimal dan mengarah.

Namun pada kenyataannya kejahatan terhadap anak terus meningkat, Menurut Keterangan Komnas Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 3.339 laporan kasus pelanggaran hak anak, sebanyak 58% diantaranya kejahatan seksual dan 8% pelakunya adalah anak berusia 14 tahun. Pada tahun 2015 januari-juni sebanyak 1.725 laporan kasus pelanggaran hak anak. Sebanyak

43% adalah kejahatan seksual dan 16 % pelakunya adalah anak 14 tahun .³ Menurut penuturan ketua Komnas perlindungan Anak “Aries Merdeka Sirait : Komnas Anak Mencatat 63 % dari 1.688 pelaku kekerasan anak yang terbukti pada tahun 2017 merupakan orang dekat atau dikenal oleh korban,dengan rincian 551 merupakan teman 33 %,tetangga 151 pelaku 9 %,bapak atau ibu guru 98 pelaku 6 %,ayah atau ibu kandung 76 orang 4 %,pacar 72 pelaku 4 %,ayah atau ibu tiri 60 orang 4 %,pembantu atau pengasuh sebanyak 47 pelaku 3 %,selebihnya 535 pelaku tidak dikenal 32 %,oknum aparat sebanyak 41 orang 2 %,dan 57 orang 3 % lainnya merupakan orang lain.⁴

Berdasar dari data diatas, salah satu bentuk kejahatan yang paling sering dilakukan terhadap anak adalah bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya tidak lain orang terdekat korban itu sendiri, seperti halnya didalam permasalahan yang penulis angkat yaitu Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri.

Kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa”separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh

³Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:PTIK,2016), h.153

⁴Tribun News, pendapat Aries Merdeka Sirait dikutip dalam Jurnal *Komnas Anak* ([Tanggal Akses 2 Desember 2018 Pukul 23.30 Wita.](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/komnas-pa-catat-63-persen-dari-1688-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-orang-dekat.)

orang jahat dan baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.⁵

Dorongan emosional dan hawa nafsu membuat masyarakat rentan dalam berbuat kejahatan dan salah satu kejahatan yang paling kompleks dan sangat sering terjadi adalah kejahatan kesusilaan utamanya terhadap perempuan dan anak, baik itu anak kandung maupun anak tiri.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat, karena anak dianggap tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, perzinahan dan lain-lain, hal ini berpotensi akan terus meningkatnya kasus terhadap anak dibawah umur.

Anak merupakan aset yang sangat berharga, sebagai suatu sumber daya manusia yang orientasinya sebagai tonggak penerus cita-cita bangsa yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pembinaan yang positif dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis dari anak.

Kekerasan terhadap anak adalah “setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁶ Sedangkan kekerasan seksual semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.

Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman”(verbal) dan “pemaksaan”(tindakan).” Ancaman merupakan suatu bentuk

⁵Ismatullah Deddy dalam bukunya, *Kriminologi* (Bandung:CV.Pustaka Setia,2016),h.19

⁶Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), h.60

tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberikan efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

-Pasal 81 Ayat 1” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ,dipidana dengan penjara paling lama 15(lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000(Tiga ratus jatuh rupiah)dan paling sedikit Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

-Pasal 81 Ayat 2” Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang –Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang merupakan landasan yuridis/kepastian hukum dalam menghukum dan menjerat pelaku kekerasan seksual pada anak, selain itu pemerintah telah mengeluarkan Perppu yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo di Istana Merdeka , Jakarta, Rabu (25/5), untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menerapkan hukuman terberat terhadap para pelaku. Hukuman itu berupa pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku ,kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁷

⁷Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*(Jakarta:PTIK,.2017),h.159

Dikarenakan kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi dengan hukuman terberat, seperti halnya aturan yang terdapat didalam :

Perppu No.1 tahun 2016/UU RI No.17 Tahun 2016 (Pasal 82 dan 84)

-Pasal 82 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-Pasal 84 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan /atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Begitu banyak dan bervariasi persoalan hukum yang perlu diselesaikan di negara ini, seperti halnya kasus yang diangkat oleh penulis, agar cita-cita negara hukum yang disampaikan oleh “*The Founding Fathers*” dapat diwujudkan.⁸

Apa yang coba diangkat oleh penulis yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Maros merupakan kejahatan seksual terhadap anak yang akibatnya menimbulkan gangguan reproduksi terhadap anak dan membuat anak yang menjadi korban mengalami trauma psikologis karena perbuatannya yang dilakukan tidak hanya sekali serta umur anak yang dikategorikan masih belia.

⁸Jumadi, Desember 2019, *Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/5491> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2018

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan NO.74/Pid.Sus/2018/ PN.Mrs).

1. Tindak Pidana

Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHPid, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strfbaar feit* ini sebagai tindak pidana.⁹

Staftbaar feit terdiri dari 3 kata¹⁰, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa,” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid.¹¹

⁹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.55.

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*(Jakarta: PT.Grafindo, 2002), h.69.

¹¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.57.

Didalam KUHP tindak pidana atau delik dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga. Kemudian, tindak pidana diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil), Delik Dolus dan Delik Culpa, Delik Commissionis dan Delik Ommisionis, Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan), dan Jenis Delik yang Lain.¹²

2. Persetubuhan

Persetubuhan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana disebutkan atau terkandung dalam pasal 287 KUHP. Menurut R.Soesilo menyatakan persetubuhan itu pada dasarnya.¹³

“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Modern kata “bersetubuh artinya sebagai berikut :

“Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan”(hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.

3. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau yang mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi :”membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.suatu

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.58-62.

¹³Pendapat R.soesilo seperti yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam bukunya, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia,2015),h.5

contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan pria tersebut.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa terminologi klasik dalam makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya pelaku yang sebelum melakukan tindakan pemerkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari terminologi “Ancaman Kekerasan Memaksa” yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat phisikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Contoh misalnya dengan mengancam menggunakan senjata api atau senjata tajam, tumpul untuk memaksa berhubungan badan dengan pelaku.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, judul skripsi penulis mengklasifikasikannya kedalam bentuk “dengan ancaman kekerasan” dikarenakan

didalam kronologis kasus dimana korban diancam menggunakan senjata tajam (parang) oleh pelaku.¹⁴

4. Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵

Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”¹⁶Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara,dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁷

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan,begitu juga menurut pakar ahli. Akan Tetapi dari beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai kesamaan mengenai pengertian anak tersebut,karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para ahli.

¹⁴A.SR.Sianturi,*Tindak Pidana di KUHP Berikut uraiannya*, (Jakarta:cetakan ke-2,1989), h.231-81

¹⁵W.J.S. Poerwadaminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Balasi Pustaka:Amirko,1984), h.25

¹⁶R.AKoesnan,*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*,(Bandung:Sumur, 2005),h.113

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika,1992),h.28

5. Ayah Tiri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak, dengan kata lain ayah adalah kepala keluarga, yang dapat pula diartikan laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga, sedangkan yang dimaksud ayah kandung ialah ayah yang sebenarnya dan ayah tiri ialah laki-laki (bukan ayah kandung) yang menikah dengan ibu kandung dari seorang anak.¹⁸

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun yang menjadi pokok masalah maka penulis membatasi sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang terjadi di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku persetubuhan disertai ancaman kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang terjadi di Kabupaten Maros?

D. Kajian Pustaka

1. Frans Maramis buku yang berjudul “Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia yang merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam kitab UU Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam UU di luar KUHPidana), dan yang tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku

¹⁸W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984) ,h.30

ini mencakup baik ketentuan umum maupun tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, perbedaan buku ini dari skripsi penulis adalah dalam buku ini hanya membahas mengenai tindak pidana secara umum tidak membahas mengenai Tindak pidana pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak.

2. Buku selanjutnya adalah Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”Yang di ditulis oleh Ismantoro Dwi Yuwono. Dalam buku ini memiliki kelebihan dari buku lain yang digunakan penulis sebagai referensi karena buku ini lebih menjelaskan spesifik terkait pemasalahan seksual terhadap anak disertai kasus-kasus yang sudah pernah terjadi pada anak. Dan pada penulisan skripsi ini penulis cenderung menganalisis terkait penerapan hukum pidana materilnya.
3. Renggong Ruslan, dengan bukunya “Hukum pidana Khusus” buku ini memfokuskan terhadap penejelasan terhadap Undang-Undang diluar dari KUHP Pidana, dan salah satu yang digunakan penulis didalam buku ini terkait dengan UU No.23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak. Penulis mencoba menggali lebih dalam terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri(studi putusan No.74/2018/PN.Mrs).
4. Soeroso Hadiati Moerti, dengan bukunya “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Pada buku ini memfokuskan pada UU No.23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk penanganannya serta sanksi yang diberikan terhadap pelakunya, sedangkan

pertimbangan penulis dalam memasukkan buku ini sebagai referensi ialah dalam buku ini menjelaskan mengenai aturan pidana dan siapa saja yang menjadi aspek perlindungan dalam rumah tangga.

5. Teguh Prasetyo, dalam bukunya “Hukum Pidana” Edisi kedua didalam buku ini lebih terfokus pada teori-teori pidana dan bentuk pemidanaan ,yang sangat dibutuhkan oleh penulis didalam menyusun bahan skripsi, karena didalam buku ini menjelaskan secara spesifik terkait pertimbangan hukum pidana melihat dari aspek teori pidananya.
6. Ende Hasbi Nassarudin, dengan bukunya “Kriminologi” dalam buku ini lebih menjelaskan mengenai teori bentuk kejahatan ,dan melihat dari sisi kejiwaan(psikologis) dari seseorang yang melakukan Tindak Pidana kejahatan. Penulis menjadikan buku ini sebagai referensi dikarenakan didalam buku ini memfokuskan terkait dengan kejahatan dan yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan kejahatan.
7. H.R Abdussalam dan Adri Desaasfuryanto dengan bukunya “Hukum Perlindungan Anak” buku ini sendiri memfokuskan terhadap Kedudukan Anak dimata hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan terkait dengan hukum pidana materil oleh pelaku kejahatan terhadap anak.
8. Frans Maramis “Hukum Pidana Umum” buku ini lebih kearah hukum pidana secara umum dan jenis-jenis tindak pidana. Sedangkan penulisan skripsi ini, lebih terfokus kepada bentuk kejahatan seksual terhadap anak dari sisi pidananya.

9. Andika Wijaya,"Darurat Kejahatan Seksual"buku ini lebih menganalisis terkait dengan kondisi sekarang yang dimana telah banyak kejadian kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Penulis mencoba mencari data dari buku darurat kejahatan seksual. Perbedaan buku ini dengan Skripsi penulis adalah buku ini mengangkat banyak kasus terkait dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak namun penulis lebih memfokuskan terhadap kejahatan seksual (pemeriksaan) oleh ayah tiri.
10. Skripsi dari Nurjayady dengan Judul Skripsinya"Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur(Studi Putusan No.182/Pid.Sus/2018/PN.SGM). Dalam skripsi ini lebih terfokus pada bentuk-bentuk pencabulan terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta penerapan pidana materil. Sedangkan penulisan dalam bahan skripsi saya,lebih terarah pada persetubuhan terhadap anak .
11. Bambang Sunggono,"Metode Penelitian Hukum."Buku ini sebagai penunjang di dalam pembuatan skripsi, dikarenakan didalam buku ini memberikan contoh serta penjelasan mengenai metode apa saja yang harus digunakan dalam pembuatan skripsi.
12. Rahman Syamsuddin,"Merajut Hukum di Indonesia" dalam buku ini memfokuskan terkait masalah hukum yang ada di Indonesia dan menguak sisi lain dari hukum yang diterapkan di Indonesia. Perbedaan buku ini dengan skripsi penulis adalah penulis lebih kearah perbuatan persetubuhan yang obyeknya adalah anak sedangkan buku ini memberikan gambaran hukum secara umum.

13. Sinar Grafika,"KUHP dan KUHP" pada buku ini memfokuskan pada hukum pidana materil dan formil pada perbuatan pidana, sedangkan pada penulisan ini, penulis lebih merujuk pada aturan hukum perlindungan pada anak(Delik diluar KUHP) .
14. Topo Santoso,"Asas-Asas Hukum Pidana Islam"buku ini lebih terfokus pada asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana islam dan menjadi pembanding antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
15. Adami Chazawi,"Pelajaran Hukum Pidana "Bagian I ,perbedaan buku ini dengan buku lain adalah sebagai pengantar dalam mengetahui Hukum Pidana yang diterapkan di Indonesia.
16. H.Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Islam"dalam buku ini memfokuskan terkait dengan menelisik sanksi pidana dari sisi hukum islam.yang dimana penulis membandingkan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam yang berlaku di Indonesia.
17. Adami Chazawi"Tindak Pidana Mengenai Kesopanan"dalam buku ini memfokuskan terhadap bentuk kejahatan terhadap norma kesopanan,yang salah satunya diangkat oleh penulis terkait dengan *persetubuhan*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

F. Mafaat penelitian

Hasil penelitian tersebut dapat diharapkan mampu memberikan manfaat manfaat sebagai berikut

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap perkara-perkara yang terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya dalam menecegah dan menanggulagi terjadinya kejahatan seksual disertai kekerasan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁹

Selain dari penjelasan diatas ada beberapa istilah lain dari tindak pidana di antaranya delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, *Criminal act*, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak pidana itu sendiri.²⁰ Menurut Prof. Dr. Topo santoso dalam bukunya, Tindak pidana berarti suatu pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Selanjutnya, dalam beberapa literatur hukum dan perundang-undangan yang ada, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Tindak Pidana*, dapat di katakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No.11/PNS/1963 tentang

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I (Cet.I, Jakarta:PT.Grafindo ,2002),h.67.

²⁰Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.12.

Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Th.1999), dan perundang-undang lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro

- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya : Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum Indonesia, Prof. A Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah ini, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1)
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strfbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1”. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah seperti pada judul buku beliau “Delik-Delik Percobaan Delik –Delik Penyertaan”, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana” begitu juga

Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”.

- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3)
- g. *Perbuatan Pidana*, suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik dalam perundang-undangan maupun peraturan daerah.²¹

Dari berbagai istilah diatas, peneliti berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Yang mana dalam undang-undang perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana bagi yang melanggarnya.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai²² :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Adapun alasan Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana lebih tepat adalah:

²¹Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.193.

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.71.

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu (perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.²³

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Maksudnya

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.78.

ialah unsur tindak pidana ini berlandaskan pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).²⁴ Menurut *Moeljatno* sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, unsur tindak pidana²⁵ adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut *R.Tresna* sebagaimana definisi beliau yang menyatakan bahwa, "*Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*",²⁶ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara lain :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan manusia;

²⁴Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, h.193.

²⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Cetakan kedua* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.48

²⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.72.

- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana tersebut adalah :

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan.

Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau positif (handelen), juga dapat disebut perbuatan materiil (materiel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.²⁷Contoh perbuatannya yaitu tidak memberikan pertolongan (531).

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit.

Yang dimaksud tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya. Contohnya perbuatan : menghilangkan nyawa (338), abstrak, terdiri banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya. Misalnya mencekik, menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya.

²⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.83-84.

Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih kongkrit, misalnya mengambil (362, pencurian), memberi keterangan (242), mengedarkan (247), dan lain-lain.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materiel wederrechtelijk*).²⁸ Karena bersumber pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Namun, ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas didalam undang-undang.²⁹ Contohnya, pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi³⁰:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dari sudut pandang undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.86.

²⁹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), h.14.

³⁰R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, 2010), h.88.

Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:

- 1) Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) , istilah inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya dalam pasal 362, 368, 369, 372, 378.
- 2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (*zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya pasal 548, 549c.
- 3) Tanpa izin (*zonder verlof*), misalnya pada pasal 496, 520.
- 4) Melampaui kekuasaannya (*met over schrijding van zijne bevoegdheid*), misalnya pada pasal 430.
- 5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (*zonder inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*), misalnya pada pasal 429.

Kelima istilah tersebut diatas merupakan pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*.³¹

³¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 89-90

Dalam hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa *geen strafbaar feit zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.³² Menurut hemat peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu tindak pidana.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. Misalnya pada pasal 288 jika akibat luka berat (ayat 2) tidak timbul, maka yang terjadi adalah berupa kejahatan yang selesai yakni bersetubuh dengan wanita yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka (bukan luka berat, ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan wanita yang belum

³²Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 14.

waktunnya dikawini yang menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, timbulnya akibat ialah setelah perbuatan dilakukan.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat³³:

- (1) Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut pasal 285, 289, dan 368.
- (2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, hal ini merupakan syarat untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan, misalnya pada pasal 363 (1) sub 5 tentang cara-cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (3) Mengenai obyek tindak pidana, yakni berupa semua keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian (pasal 362).
- (4) Mengenai subyek tindak pidana, yaitu segala keadaan diri subyek tindak pidana, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif adalah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI (451). Sedangkan, yang bersifat subyektif adalah keadaan

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 103-106.

mengenai batin subyek hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (pasal 340, 353)

- (5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada ditempat kediaman (pasal 363 ayat 1 ke-3)
- (6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat pemberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

Terdapat beberapa teori pembedaan atau dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergelidings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*)

2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltherorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan

dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3. Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁴

3. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang

³⁴Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta; mitra wacana media 2014),h. 244-249

harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;

- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Adapun beberapa Jenis-jenis pemidanaan yang terdiri atas:³⁵

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barag tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut:

³⁵Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta; Mitra Wacana Media 2014),h 243.

1. Pidana pokok;

- a. Pidana penjara: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
- b. Pidana kurungan: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
- c. Pidana tutupan: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
- d. Pidana denda: Jaksa;

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang di cabut tersebut;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; jaksa
- c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri.

Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*)

2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltherorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi

hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3. Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan.

Dalam kamus bahasa Indonesia persetubuhan merupakan:hal bersenggama;hal bersetubuh.

Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali menyamakannya dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif Hukum ,hal tersebut sangatlah berbeda. Dimana jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengancam,atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan hal tersebut disebut sebagai tindak pidana *Pemerkosaan* sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingi atau bujuk rayu dari orang lain untuk melakukan hubungan intim perbuatan itu disebut dengan *Persetubuhan*.

³⁶Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta: mitra wacana media 2014),h. 244-249

Dalam rumusan KUHP menurut Zainal Abidin Farid persetubuhan diartikan sebagai: “Tindakan memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan”. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan wanita, akan tetapi air mani pria belum keluar hal itu belum merupakan sebagai bentuk perkosaan melainkan percobaan perkosaan.

Namun Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.³⁷

2. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Persetubuhan

a. Persetubuhan dalam tinjauan KUHP Diatur dalam pasal 287 Ayat (1)

“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”³⁸

Dari bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (persetubuhan) yang datangnya berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa diancam dengan hukuman

³⁷Pendapat Zainal Abidin seperti yang dikutip Arham Latioef dalam Artikelnya, *Kejahatan Seksual*, (<https://core.ac.uk/download/pdf/25489860.pdf>) Tanggal akses 5 Oktober 2018 Pukul 20.30 Wita

³⁸ KUHP, *Buku II tentang kejahatan pasal 287 ayat (1)* (Jakarta: Sinar Grafika), h.98

pidana penjara selama 9 Tahun apabila memperkosa anak yang belum cukup umur (dibawah 15) tahun atau diperkirakan masih belum cukup umur itu artinya KUHP menilai persetubuhan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampaknya yang merusak inilah KUHP kemudian memberikan penilaian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang jahat dan harus dihukum.³⁹

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana (KUHP) adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada "kekuatan" normatif yang diciptakan oleh KUHP untuk menghambat libido disalurkan pada obyek yang tidak semestinya. Meminjam pemikiran dari Sigmund Freud, tindakan menghambat ini dilakukan agar libido bisa disalurkan secara positif atau kedalam bentuk tindakan yang tidak merusak.

Namun sayang sekali perlindungan hukum pidana terkesan masih "setengah hati" karena didalam KUHP disebutkan bahwa persetubuhan antara orang dewasa itu walaupun dilarang, namun tindakan itu baru bisa dijatuhi hukuman pidana jika hal itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan kata lain, tindakan ini dimasukkan oleh KUHP sebagai delik aduan, ini artinya pelaku baru bisa diproses secara hukum apabila ada pihak yang melaporkan. Dan apabila laporan dicabut oleh pihak pelapor, konsekuensinya pelaku tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum.

"Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan" (pasal 287 ayat 2) KUHP

³⁹Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015), h.17

Kesimpulan dari penulis, digolongkannya kekerasan seksual dalam bentuk ini (hubungan seksual orang dewasa terhadap anak) ke dalam kategori delik aduan adalah tindakan yang telah menyakiti rasa keadilan, terutama rasa keadilan dari pihak korban (anak).

b. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan anak (UU No.23 Tahun 2002)

Tindak Pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 pada pasal 81 ayat 1 dan 2

“Pasal 81 ayat 1 berbunyi” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

“Pasal 81 ayat 2 berbunyi”Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴⁰

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur lebih spesifik dan hukuman yang diberikan setimpal dengan apa yang dilakukan terhadap anak. Pada Bab II pasal 3 UU No.23 tahun2002 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,berakhlak mulia,dan sejahtera.

Artinya menurut naskah akademik, lahirnya UU No.23 tahun 2002 adalah demi terciptanya rasa keamanan terhadap anak,agar anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa ada intimidasi dan perlakuan yang sewena-wena terhadap anak serta hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Anak,karena anak wajib untuk dilindungi dan dibina bukan untuk disiksa.

Dan dalam sistem hukum di Indonesia kita mengenal ada beberapa asas dan salah satunya yakni *Asas Lex Specialis Derogat Legi generali* yang berarti bahwa hukum/aturan yang bersifat khusus(*Lex Spesialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum(*Lex Generali*). Artinya Undang-Undang Perlindungan

⁴⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*,(Jakarta: Visimedia,2007),h.4

anak harus didahulukan daripada KUHPidana. Hal ini bertujuan agar terciptanya salah satu tujuan hukum “Kepastian Hukum” bagi aparat penegak hukum.

c. Persetubuhan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU No.23 tahun 2004).

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁴¹

Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.

⁴¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta; Kencana 2017), h.260-261.

3. Kekerasan Seksual.
4. Penelantaran Rumah Tangga.

Pasal 46 berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 12(dua belas)tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00(tiga puluh enaam juta rupiah).”

Pasal 8 berbunyi :

“kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”⁴²

Pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

3. Perbedaan Persetubuhan, Pemerkosaan dan Pencabulan

a. Persetubuhan

Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia: Hal besetubuh;hal bersenggama.

Tindak Pidana Persetubuhan merupakan bentuk tindak pidana kesusilaan,Dalam Kamus hukum Kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku,perbuatan,percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-

⁴² Undang-Undang No.23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum agar terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

Yang membedakan persetubuhan dengan tindak pidana pemerkosaan ialah apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar bujukan atau rayuan sehingga orang tersebut mau melakukan hubungan intim maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana persetubuhan sedangkan apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar memaksa, mengancam maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemerkosaan.

Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya mengemukakan Persetubuhan ialah "Perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani"⁴⁴

Dari penjabaran diatas maka penulis menyimpulkan Unsur-Unsur Persetubuhan:

1. Perbuatan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan
2. Tidak ada unsur paksaan
3. Kemaluan laki-laki telah masuk kedalam kemaluan perempuan.
4. Dengan maksud dan tujuan.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan memasukkan secara paksa Penis kedalam Vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya

⁴³Soedarso, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), h.64

⁴⁴Pendapat Hoge Raad seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h.58

bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan(memasukkan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur),sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan oleh orang dewasa atau orang dewasa dengan anak.⁴⁵

Pada pasal 285 KUHP menjelaskan mengenai delik materil perkosaan

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan memaksa seseorang yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,dihukum karena memperkosa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Dari uraian delik materil permerkosaan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerkosaan :

1. Tidak ada hubungan ikatan pernikahan.
2. Harus dengan kekerasan dan mengancam dengan kekerasan.
3. Ada unsur paksaan.
4. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya.

c. Pencabulan

Pencabulan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencabuli.

Menurut R .susilo pencabulan adalah”segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,

⁴⁵Ismantoro Dwi Yuwono,*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*(Jakarta:Pustaka yustisia.2015),h.4

meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.⁴⁶

Pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP. Berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.”⁴⁷

Didalam KUHP maupun UU Perlindungan anak, dan UU Penghapusan KDRT tidak mendefinisikan secara jelas terkait dengan perbuatan cabul namun dalam beberapa pendapat, terdapat perbedaan antara bersetubuh dan pencabulan seperti yang dikemukakan oleh Hoge Road, persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang diisyaratkan masuknya penis ke dalam vagina, sedangkan pencabulan belum terjadinya penetrasi kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita. Dengan kata lain biasanya perbuatan ini ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin seperti memegang buah dada wanita, mencium mulut lawan jenis, menyentuh bagian tertentu dari wanita dan lain sebagainya.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Ancaman Kekerasan dan Kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan

⁴⁶Pendapat R.Susilo seperti yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono didalam bukunya, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015), h.1

⁴⁷KUHAP dan KUHP, Buku II Tentang Kejahatan Bab XIV (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h.99

⁴⁸Arham . *Tindak Pidana Persetubuhan* (<https://core.ac.uk/download/pdf/25489860pdf>) . Tanggal Akses 12 Oktober 2018 Pukul 23.10 Wita

senjata tajam,sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis,seksual,dan atau penelantaran,termasuk ancaman melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. ⁴⁹

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ?Jawabannya adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.Dengan kata lain,kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak(M.Irsyad Thamrin dan M.Farid 2010:518). Inti dari kekerasan seksual terletak pada”ancaman”(Verbal) dan “pemaksaan”(tindakan).

Berdasarkan atas apa yang telah penulis sampaikan tersebut. Maka dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur yang ada dalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman,memaksa,dan memperkosa. ⁵⁰

2. Bentuk-Bentuk dan Jenis-Jenis Kekerasan

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu,keluarga,atau kelompok Jach D.Douglas dan

⁴⁹ H.R Abdussalam,*Hukum Perlindungan anak*(Jakarta:PTIK.2016),h.168

⁵⁰Ismantoro Dwi Yuwono,*Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia.2015),h.2

Franches Chaput Waskler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut⁵¹.

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat dari luar, akibat dari perkelahian.
- b. Kekerasan tertutup (covert), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan.
- d. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka.

Sekalipun lebih bersifat umum, paparan itu menunjukkan kekerasan fisik ataupun nonfisik. Selanjutnya, John Galtung (2003) menggabungkan analisis yang berorientasi akhir dengan analisis yang berorientasi struktural. Menurut Galtung, kekerasan terjadi apabila manusia dipengaruhi ketimpangan pemikiran sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan tersebut didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Pada satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di "dalam" dan pada pihak lain potensi menuntut untuk diaktualkan, yaitu dengan pihak lain potensi menuntut untuk diaktualkan, yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih diartikan pada segi

⁵¹ Pendapat D. Douglas dan Franches Chaput Waskler seperti dikutip H. Deddy Ismatullah dalam bukunya, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 132

akibat atau pengaruh pada manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan, keinginan yang muncul dari dalam diri manusia, yang gagal terealisasi dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Jenis Kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga adalah sebagai berikut.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan secara fisik menyakiti orang yang menjadi sasaran. Kekerasan Fisik mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membantak, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat.

Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya perlukaan. Bekas Luka itu dapat diakibatkan oleh episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya melalui perilaku fisik. Kekerasan seksual tidak terbatas pada pemerkosaan atau pemaksaan hubungan persentuhan saja, tetapi mencakup juga berbagai jenis perilaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual, dan tidak terbatas juga pada penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi mencakup penggunaan alat atau benda

untuk menimbulkan penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian-bagian tubuhnya.

Seperti yang diatur dalam pasal 288 KUHP dinyatakan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau patut disangka, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”

Berangkat dari Unsur-Unsur yang terkandung didalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual kedalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan (2) kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa). Kelompok ke-2 inilah yang disebut dengan istilah serangan seksual.

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain:

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral seks
4. Seksual Gesture
5. Sexual Remark
6. Pelecehan seksual
7. Sunat klitoris pada anak perempuan

Kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan

memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

c. Kekerasan psikologi

Kekerasan psikologi dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Jenis kekerasan psikologi adalah bentakan, makian, penghinaan, sikap merendahkan diri, ancaman untuk menimbulkan rasa takut, larangan untuk berhubungan dengan orang lain, atau bentuk-bentuk pembatasan bergerak lain.

Kekerasan psikologi jauh lebih menyakitkan karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, sekalipun kekerasan psikologi tidak akan merusak tubuh bagian dalam atau tindakan yang berkaitan dengan kematian.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi dialami oleh istri atau pasangan hidup bersama pelaku, Suami mengontrol hak keuangan istri. Memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sedangkan, ia tidak bekerja serta tidak memberi uang belanja. Ia memakai atau menghabiskan uang istri.⁵²

D. Tinjauan Umum Terhadap Anak Dan Ayah

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

⁵²H.Deddy Ismatullah, *Kriminologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 135-136

Anak adalah amanah dari karunia Tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas,potensi,dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵³

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun,kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *Convention on the Right of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun ,termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan asat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).⁵⁴

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

a) Anak Menurut UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵³Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*.(Jakarta: Visimedia,2007),h.90

⁵⁴H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:PTIK,2016),h.5

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia dianggap sebagai orang telah dewasa bukan lagi anak-anak.⁵⁵

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin(Pasal 1 butir 2).⁵⁶

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁷

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

⁵⁵Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), h.90

⁵⁶ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h.52

⁵⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, h.52

Anak adalah setiap manusia yang belum berusia dibawah 18 (delapan belas)tahun dan belum menikah,termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁵⁸

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat di katakan tergolong anak,pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”⁵⁹

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikuti dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan,anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai,jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa,yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁶⁰

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut diatas yang cukup bervariasi tersebut,kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang

⁵⁸Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999,(Jakarta : Asa Mandiri,2006),h.5

⁵⁹Bisma Siregar,*Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*,(Jakarta: Rajawali,1986),h.105

⁶⁰Pendapat Sugiri seperti dikutip Maidin Gultom dalam bukunya, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Cetakan Kedua,(Bandung : PT.Refika Aditam,2010),h.32

tentang Perlindungan Anak sendiri diterapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Pengertian Ayah Tiri

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Ayah berarti Orang tua laki-laki dari anak. Artinya ialah ayah merupakan sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menafkahi dan melindungi segenap keluarganya. Sedangkan ayah tiri adalah orang tua laki-laki dari anak, yang tidak memiliki hubungan darah tetapi merupakan tanggung jawabnya dalam menafkahi serta melindungi dari segala macam ancaman.

3. Upaya Perlindungan Terhadap Anak.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat 1). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2). Setiap anak berhak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat 1).

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (pasal 58 ayat 1). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan

fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk atau pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.(ayat 2).⁶¹

Artinya dalam bunyi ayat tersebut kekerasan terhadap anak itu tidak dibenarkan sama sekali baik itu ayah kandung, ayah tiri maupun wali, karena anak merupakan cita penerus bangsa yang seharusnya/semestinya harus dilindungi dan memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Dan pada bunyi ayat kedua, pelaku terhadap kekerasan terhadap anak haruslah dihukum berat.

Tuntunan bagi orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan seksual:

a. Tindakan Antisipatif.

Setiap orangtua tentunya tak ingin anaknya menjadi korban kekerasan seksual dan apabila kelak dewasa menjadi seorang pedofilia untuk mencegah hal-hal yang menakutkan itu terjadi tentunya para orang tua harus memiliki pengetahuan bagaimana caranya mereka menjaga dan melindungi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dan terjerumus dalam perilaku yang menyimpang tersebut.⁶²

a. Materi bukan segala-galanya

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anaknya agar tidak mengukir segala sesuatu dengan materi, diantaranya, selalu memberikan reward berupa pujian, dukungan dan rasa gembira apabila anak-anak melakukan hal yang baik.

⁶¹Adri desasfuryanto, *Hukum Perlindungan anak* (Jakarta:PTIK,2016),h.33-34

⁶²Iswantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015),h.114

Perhatian orangtua kepada anak adalah hal yang terpenting untuk pertama, membuat anak bahagia dan yang kedua, mencegah anak dari seorang yang materialistik.

b. Pendidikan Seks Terhadap Anak.

Sampai saat ini banyak orangtua yang merasa tabu membicarakan masalah seks dan seksualitas kepada anak-anak. Sebagian dari masyarakat memilih diam untuk membicarakan hal itu dan berharap anak akan mendapatkan pendidikan itu dari sekolahnya dan media lainnya yang tidak merusak.

Baik orangtua maupun sekolah yang menganggap tabu mengajarkan dan membicarakan seks dan sexualitas adalah keliru. karena ketidaktahuan anak terhadap masalah ini, membuat anak rentan untuk melakukan sex bebas (*free sex*) dan menjadi incaran para pengidap penyakit pedofilia. Untuk melindungi anak dari kekerasan seksual penting kiranya anak diajarkan tentang seks dan seksualitas sesuai dengan usia dan pemahamannya. Hal ini sudah bisa diajarkan sejak dini dan saat anak bertanya tentang seks dan seksualitas, bicarakan secara terbuka.

c. Hindari Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak.

Orangtua yang sering melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan anak akan mencari tempat pelarian terhadap orang yang dianggap sayang terhadapnya. Ketika orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, orangtua juga mengajarkan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menindas orang yang lemah dan bahkan anak akan merekam bahwa melalui kekerasanlah orang dewasa dapat menguasai anak-anak.

Dan yang harus dilakukan jika anak menjadi korban kekerasan seksual ,tindakan pertama jangan memarahi anak. Berikan perlindungan kasih sayang kepada anak. Anak-anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan dan pertolongan bisa diselamatkan dan dipulihkan mentalnya. Selain itu,anak akan tumbuh tanpa gangguan mental atau masalah serius perilaku penyimpangan seksual.

Tindakan selanjutnya adalah segera bawa anak untuk memperoleh pengobatan secara medis,melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian,dan meminta lembaga perlindungan anak atau lembaga lainnya untuk membantu anak menyembuhkan traumanya dari peristiwa yang dialaminya.

E. Tinjauan Hukum Islam Terkait Dengan Persetubuhan

Persetubuhan merupakan suatu bentuk kejahatan seksual, seksualitas berasal dari kata “*seks*”dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan *seks* sebagai :jenis kelamin ,sesuatu yang ada kaitannya dengan alat kelamin,seperi senggama.

Seks sebagai syarat kehidupan,merupakan fitrah biologis yang berlaku dalam kehidupan manusia.seperti halnya yang dikatakan oleh Arnold J.Toynbee bahwa semua spesies yang mempertahankan kehidupannya dengan cara memproduksi diri bekerja sama diantara dua anggotanya yang berlawanan jenis kelamin yang tidak secara langsung menguntungkan individu-individu itu,tetapi membrikan jasa bagi spesiesnya untuk menjaga dari kepunahan.⁶³

Persoalan-persoalan dan kajian atas seksualitas merupakan persoalan yang sudah menjadi bagian masyarakat sudah dari dulu. Persoalan tentang seksualitas

⁶³Andika Wijaya,*Darurat Kejahatan Seksual*(Jakarta:Sinar Grafika.2016),h.13

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH B
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH B
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH B
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH B
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH B
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Asia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan
ah memperkembangbiakkan laki-laki dan
allah kepada Allah yang dengan (memp
eminta satu sama lain, dan peli
hnya Allah selalu menjaga dan mengawa
ng merupakan kebutuhan biologis yan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
melanjutkan tumbuh dan berkembangnya
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
lahgunakan mengenai seks tersebut s
LAH B
is mengenai “Tindak Pidana Persetubuh
rtai Kekerasan Oleh Ayah Tiri”

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dasar hukum sanksi zina didalam hadis

Dasar hukum mengenai perbuatan zina yang tercantum didalam hadis cukup banyak berdasarkan dari prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berzina. Hadis tentang zina diungkapkan di antaranya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَرْنَا اللِّسَانَ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى حَظَّهُ مِنَ الزَّنا أَدْرَكَ ۖ وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya: Nabi saw. Bersabda: Allah swt. Telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina keinginan tersebut tidak dapat diletakkan, yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penenturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.⁶⁴

⁶⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), h. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan Pengadilan Negeri Maros Kelas I B.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada pengadilan negeri maros kelas I B dikarenakan obyek penelitian berada di wilayah Kabupaten Maros.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif- empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah penerapan hukum pidana pelaku pemaksaan anak melakukan persetujuan oleh ayah tiri pada putusan nomor:74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan pada anak, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari

ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum *normative* yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concerto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum *normative* yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.⁶⁵

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum *normative empiris* membutuhkan data sekunder dan data primer :

1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Data Sekunder, antara lain berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan hakim yang menangani perkara.

⁶⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.33

C. Metode Pengumpulan Data.

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan(*field research*), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Maros. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak diinstansi terkait.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat, dalam hal ini majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

D. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang terjadi di Dusun Pucak Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Hakim berupaya mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dengan berpegang teguh pada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mencapai rasa keadilan bagi semua pihak.

Maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai uraian kasus posisi Yang terjadi diruang linkup Pengadilan Negeri Maros (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs).

1. Identitas Terdakwa :

Nama : Tuwo Alias Tahir Bin Baco;

Tempat lahir : Bantialang Kab.Pangkep;

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/01 Juli 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

2. Kasus Posisi

Awalnya pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu anak NUR FITRI RAMADANI sedang tidur-tiduran di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek anak dari NUR FITRI RAMADANI, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi BASRIA Binti BACO SELE, namun pada saat itu saksi BASRIA Binti Baco Sele sedang berada di kebun, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri anak NUR FITRI RAMADANI dan mendekati anak NUR FITRI RAMADANI sambil membawa sebilah parang yang sudah terbuka dari sarungnya, lalu saat itu juga terdakwa langsung memeluk badan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI menolak perbuatan terdakwa, karena anak NUR FITRI RAMADANI menolak untuk dipeluk, terdakwa hendak memukul anak NUR FITRI RAMADANI yang mengakibatkan anak NUR FITRI RAMADANI ketakutan, kemudian terdakwa mengajak anak NUR FITRI RAMADANI berhubungan badan dengan cara mengancam anak NUR FITRI RAMADANI menggunakan parang dan meletakkan parang tersebut di atas pundak anak NUR FITRI RAMADANI sambil mengatakan “*kalau tidak mauko kotebbakko*” yang artinya “*kalau kamu tidak mau saya parangi*” sehingga anak NUR FITRI RAMADANI menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang anak NUR FITRI RAMADANI beserta celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dan menyuruh anak NUR FITRI RAMADANI untuk berbaring dengan posisi miring, setelah itu anak NUR FITRI RAMADANI merasakan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam

kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI lalu menggoyang-goyangkannya keluar masuk dari dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI tidak mengetahui apakah sperma terdakwa keluar di dalam atau di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Akibat perbuatan terdakwa anak NUR FITRI RAMADANI mengalami luka di bagian selaput dara anak NUR FITRI RAMADANI, sesuai dengan *Visum et Repertum* RSUD Salewangang Maros Nomor: 364/RSU SLWG/VER/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama NUR FITRI RAMADANI, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan colok dubur tampak selaput dara robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam, Sembilan, sebelas.
- Kesan: selaput dara tidak utuh disebabkan oleh benturan benda tumpul.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

KESATU :

Bahwa Terdakwa **TUWO Alias TAHIR Bin BACO**, pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Dusun Pucak Desa Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros, tepatnya di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek dari anak NUR FITRI RAMADANI, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi BASRIA Binti BACO SELE, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **“Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa**

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, terhadap anak NUR FITRI RAMADANI yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 2646/Ist/Cs-Mr/V/2004/2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, Drs. H. MUH. NAWAR, M.Si, dan anak NUR FITRI RAMADANI merupakan anak kandung dari Saksi BASRIA Binti BACO SELE berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7309112702120001, yang mana Saksi BASRIA Binti BACO SELE telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/09/VI/2013, dan Terdakwa melakukannya dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu anak NUR FITRI RAMADANI sedang tidur-tiduran di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek anak dari NUR FITRI RAMADANI, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi BASRIA Binti BACO SELE, namun pada saat itu saksi BASRIA Binti Baco Sele sedang berada di kebun, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri anak NUR FITRI RAMADANI dan mendekati anak NUR FITRI RAMADANI sambil membawa sebilah parang yang sudah terbuka dari sarungnya, lalu saat itu juga terdakwa langsung memeluk badan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI menolak perbuatan terdakwa, karena anak NUR FITRI RAMADANI menolak untuk dipeluk, terdakwa hendak memukul anak NUR FITRI RAMADANI yang mengakibatkan anak NUR FITRI RAMADANI

ketakutan, kemudian terdakwa mengajak anak NUR FITRI RAMADANI berhubungan badan dengan cara mengancam anak NUR FITRI RAMADANI menggunakan parang dan meletakkan parang tersebut di atas pundak anak NUR FITRI RAMADANI sambil mengatakan “*kalau tidak mauko kotebbakko*” yang artinya “*kalau kamu tidak mau saya parangi*” sehingga anak NUR FITRI RAMADANI menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang anak NUR FITRI RAMADANI beserta celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dan menyuruh anak NUR FITRI RAMADANI untuk berbaring dengan posisi miring, setelah itu anak NUR FITRI RAMADANI merasakan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI lalu menggoyang-goyangkannya keluar masuk dari dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI tidak mengetahui apakah sperma terdakwa keluar di dalam atau di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kepada anak NUR FITRI RAMADANI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana anak NUR FITRI RAMADANI tidak dapat mengingatnya lagi dan setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan anak NUR FITRI RAMADANI, terdakwa memberikan uang jajan kepada anak NUR FITRI RAMADANI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak NUR FITRI RAMADANI di rumah terdakwa, tepatnya di dalam kamar anak NUR FITRI RAMADANI pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul

14.00 wita (sepulang sekolah), dimana pada saat itu di rumah terdakwa hanya ada terdakwa dan anak NUR FITRI RAMADANI yang sedang menonton Televisi di ruang tamu, kemudian anak NUR FITRI RAMADANI masuk ke kamarnya untuk berbaring sambil memainkan Facebook di Handphone, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian terdakwa yang menggunakan sarung dan baju kaos langsung masuk ke kamar anak NUR FITRI RAMADANI, kemudian terdakwa berdiri di dekat ranjang dan langsung membuka celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dengan mengibaskan rok anak NUR FITRI RAMADANI ke atas, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Akibat perbuatan terdakwa anak NUR FITRI RAMADANI mengalami luka di bagian selaput dara anak NUR FITRI RAMADANI, sesuai dengan *Visum et Repertum* RSUD Salewangang Maros Nomor: 364/RSU SLWG/VER/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama NUR FITRI RAMADANI, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan colok dubur tampak selaput dara robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam, Sembilan, sebelas.
- Kesan: selaput dara tidak utuh disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TUWO Alias TAHIR Bin BACO**, pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Dusun Pucak Desa Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros, tepatnya di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek anak NUR FITRI RAMADANI, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **“Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa dan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, terhadap anak NUR FITRI RAMADANI yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 2646/Ist/Cs-Mr/V/2004/2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, Drs. H. MUH. NAWAR, M.Si, dan anak NUR FITRI RAMADANI merupakan anak kandung dari Saksi BASRIA Binti BACO SELE berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7309112702120001, yang mana Saksi BASRIA Binti BACO SELE telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/09/VI/2013, dan Terdakwa melakukannya dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu anak NUR FITRI RAMADANI sedang tidur-tiduran di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek anak dari NUR FITRI RAMADANI, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi BASRIA Binti BACO SELE, namun pada saat itu saksi BASRIA Binti Baco Sele sedang berada di kebun, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri anak NUR FITRI RAMADANI dan mendekati anak NUR FITRI RAMADANI sambil membawa sebilah parang yang sudah terbuka dari sarungnya, lalu saat itu juga terdakwa langsung memeluk badan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI menolak perbuatan terdakwa, karena anak NUR FITRI RAMADANI menolak untuk dipeluk, terdakwa hendak memukul anak NUR FITRI RAMADANI yang mengakibatkan anak NUR FITRI RAMADANI ketakutan, kemudian terdakwa mengajak anak NUR FITRI RAMADANI berhubungan badan dengan cara mengancam anak NUR FITRI RAMADANI menggunakan parang dan meletakkan parang tersebut di atas pundak anak NUR FITRI RAMADANI sambil mengatakan "***kalau tidak mauko kotebbakko***" yang artinya "***kalau kamu tidak mau saya parangi***" sehingga anak NUR FITRI RAMADANI menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang anak NUR FITRI RAMADANI beserta celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dan menyuruh anak NUR FITRI RAMADANI untuk berbaring dengan posisi miring, setelah itu anak NUR FITRI RAMADANI merasakan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI lalu menggoyang-goyangkannya keluar

masuk dari dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI tidak mengetahui apakah sperma terdakwa keluar di dalam atau di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kepada anak NUR FITRI RAMADANI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana anak NUR FITRI RAMADANI tidak dapat mengingatnya lagi dan setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan anak NUR FITRI RAMADANI, terdakwa memberikan uang jajan kepada anak NUR FITRI RAMADANI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak NUR FITRI RAMADANI di rumah terdakwa, tepatnya di dalam kamar anak NUR FITRI RAMADANI pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 14.00 wita (sepulang sekolah), dimana pada saat itu di rumah terdakwa hanya ada terdakwa dan anak NUR FITRI RAMADANI yang sedang menonton Televisi di ruang tamu, kemudian anak NUR FITRI RAMADANI masuk ke kamarnya untuk berbaring sambil memainkan Facebook di Handphone, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian terdakwa yang menggunakan sarung dan baju kaos langsung masuk ke kamar anak NUR FITRI RAMADANI, kemudian terdakwa berdiri di dekat ranjang dan langsung membuka celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dengan mengibaskan rok anak NUR FITRI RAMADANI ke atas, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Akibat perbuatan terdakwa anak NUR FITRI RAMADANI mengalami luka di bagian selaput dara anak NUR FITRI RAMADANI, sesuai dengan *Visum et Repertum* RSUD Salewangang Maros Nomor: 364/RSU SLWG/VER/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama NUR FITRI RAMADANI, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan colok dubur tampak selaput dara robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam, Sembilan, sebelas.
- Kesan: selaput dara tidak utuh disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **TUWO Alias TAHIR Bin BACO**, pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Dusun Pucak Desa Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros, tepatnya di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek anak NUR FITRI RAMADANI, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **“melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga”**, terhadap anak NUR FITRI RAMADANI yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 2646/Ist/Cs-Mr/V/2004/2007 yang ditanda

tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, Drs. H. MUH. NAWAR, M.Si, dan anak NUR FITRI RAMADANI merupakan anak kandung dari Saksi BASRIA Binti BACO SELE berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7309112702120001, yang mana Saksi BASRIA Binti BACO SELE telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/09/VI/2013, dan Terdakwa melakukannya dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada Bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat itu anak NUR FITRI RAMADANI sedang tidur-tiduran di kamar Saksi BASRIA Binti BACO SELE yang berada di rumah nenek anak dari NUR FITRI RAMADANI, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi BASRIA Binti BACO SELE, namun pada saat itu saksi BASRIA Binti Baco Sele sedang berada di kebun, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri anak NUR FITRI RAMADANI dan mendekati anak NUR FITRI RAMADANI sambil membawa sebilah parang yang sudah terbuka dari sarungnya, lalu saat itu juga terdakwa langsung memeluk badan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI menolak perbuatan terdakwa, karena anak NUR FITRI RAMADANI menolak untuk dipeluk, terdakwa hendak memukul anak NUR FITRI RAMADANI yang mengakibatkan anak NUR FITRI RAMADANI ketakutan, kemudian terdakwa mengajak anak NUR FITRI RAMADANI berhubungan badan, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang anak NUR FITRI RAMADANI beserta celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dan menyuruh anak NUR FITRI RAMADANI untuk berbaring dengan posisi miring,

setelah itu anak NUR FITRI RAMADANI merasakan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI lalu menggoyang-goyangkannya keluar masuk dari dalam kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI, namun anak NUR FITRI RAMADANI tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa keluar di dalam atau di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kepada anak NUR FITRI RAMADANI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana anak NUR FITRI RAMADANI tidak dapat mengingatnya lagi dan setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan anak NUR FITRI RAMADANI, terdakwa memberikan uang jajan kepada anak NUR FITRI RAMADANI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak NUR FITRI RAMADANI di rumah terdakwa, tepatnya di dalam kamar anak NUR FITRI RAMADANI pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 14.00 wita (sepulang sekolah), dimana pada saat itu di rumah terdakwa hanya ada terdakwa dan anak NUR FITRI RAMADANI yang sedang menonton televisi di ruang tamu, kemudian anak NUR FITRI RAMADANI masuk ke kamarnya untuk berbaring sambil memainkan Facebook di Handphone, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian terdakwa yang menggunakan sarung dan baju kaos langsung masuk ke kamar anak NUR FITRI RAMADANI, kemudian terdakwa berdiri di dekat ranjang dan langsung membuka celana dalam anak NUR FITRI RAMADANI dengan mengibaskan rok anak NUR FITRI RAMADANI ke atas,

setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di luar kemaluan anak NUR FITRI RAMADANI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak NUR FITRI RAMADANI mengalami luka di bagian selaput dara anak NUR FITRI RAMADANI, sesuai dengan *Visum et Repertum* RSUD Salewangang Maros Nomor: 364/RSU SLWG/VER/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama NUR FITRI RAMADANI, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan colok dubur tampak selaput dara robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam, Sembilan, sebelas.
- Kesan: selaput dara tidak utuh disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 46 jo pasal 8 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian diatas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros:

MENUNTUT

Supaya Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memutus dengan:

1. Menyatakan terdakwa TUWO Als TAHIR bin BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TUWO ALIAS TAHIR BIN BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orangtua, wali dan pengasuh anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TUWO ALIAS TAHIR BIN BACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintah barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sekolah SMP warna putih lengan panjang;
 - 1 (satu) buah rok panjang sekolah SMP warna biru;
 - Dikembalikan kepada korban NUR FITRI RAMADANI;**
 - 1 (satu) buah parang berwarna hitam dengan panjang ± 45 cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang ± 35 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

B. Faktor hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dengan Nomor Perkara(Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagai mana diatur dalam pasal 183 KUHAP⁶⁶ sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan rumusan Pasal diatas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶⁶

Alat bukti sah sebagai mana diatur dalam pasal 184 ayat (1)

KUHAP terdiri dari :

- a. Keterangan saksi;

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,(Cet ke-4,Grahamedia Press, April, 2016),h.740-741

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat,
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Selain itu juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa yang bernama BASRIA dan kedua anak tiri Terdakwa yang bernama perempuan NURAI SYAH dan perempuan NUR FITRI RAMADANI.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan korban NURFITRI RAMADANI yang pertama kalinya pada Bulan Januari tahun 2017 dan terakhir pada sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa pernah tinggal serumah dengan korban NURFITRI RAMADANI semenjak Terdakwa menikah dengan Ibu Kandungnya yang bernama Sdri.BASRIA sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi SAIMANG menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika saksi duduk dikolong rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah istri terdakwa, saksi mendengar suara laki-laki yang berbisik “passuluki bajunnu” yang artinya “buka bajumu” karena saksi penasaran dengan suara tersebut yang bersumber dari rumah istri terdakwa (BASRIA) maka saksi menuju rumah BASRIA dan begitu saksi berada didepan pintu (pintu tidak tertutup), saksi melihat terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan korban NUR FITRI RANADANI, sehingga saksi mundur kebelakang dari depan pintu, sekitar beberapa detik terdakwa keluar dari dalam kamar setelah melakukan persetubuhan dengan korban NUR FITRI RAMADANI tanpa menggunakan celana/tidak menutup alat kelaminnya sehingga saksi sempat melihat alat kelaminnya. Dan terdakwa kaget melihat saksi berdiri didepan pintu dan langsung menarik gordena dengan maksud untuk menutup alat kelaminnya dan meminta saksi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan saksi jawab bagaimana saksi dilarang untuk bercerita kepada orang lain, sementara saksi melihat langsung kamu menyetubuhi korban NUR FITRI RAMADANI. Setelah terdakwa meminta saksi untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, terdakwa masuk menuju dapur, dan tidak lama terdakwa keluar

sambil membawa parang dan saksi juga tinggalkan rumah BASRIA ketika saksi melihat terdakwa keluar dari dapur membawa parang.

- Bahwa Saksi Saimang menjelaskan bahwa korban NUR FITRI RAMADANI tinggal bersama / satu rumah dengan bapak tirinya (terdakwa) dan BASRIA di Dusun Pucak, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa terhadap terdakwa saksi sudah kenal sebelumnya sebab merupakan Bapak Tiri saksi.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa disebabkan karena Ibu Kandung saksi menikah dengan terdakwa maka secara otomatis saksi tinggal serumah dengan terdakwa karena saksi ikut dengan Ibu kandung saksi.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap diri saksi sebanyak lebih dari 10 kali.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa Adapun tempat saksi alami persetubuhan oleh terdakwa yakni di rumah Orang tua saksi tempat saksi juga tinggal sama-sama dengan terdakwa dan di rumah Nenek saksi yang tidak jauh dari rumah saksi tinggal.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa tindakan persetubuhan yang saksi maksudkan tersebut yakni terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan diri saksi.

- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa peristiwa Persetubuhan yang saksi alami pertama kalinya terjadi sekitar Bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 14.00 wita, pada saat itu saksi sedang tidru-tiduran di kamar namun saat itu ibu kandung saksi yang bernama Sdri.BASRIA sedang berangkat ke kebun, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dan mendekati saksi sambil membawa sebilah parang yang sedang terbuka dari sarungnya lalu seketika itu juga terdakwa langsung memeluk badan saksi dan seketika itu juga saksi menolak perbuatan terdakwa terhadap saksi, selanjutnya pada saat saksi menolak untuk dipeluk terdakwa hendak memukul saksi maka saat itu saksi ketakutan lalu terdakwa mengajak saksi berhubungan badan dengan cara mengancam saksi menggunakan parang dan meletakkan parang tersebut di atas pundak saksi sambil mengatakan “kalau tidak mauko kotebbakko” yang artinya “kalau kamu tidak mau saya parangi” maka akibat dari tindakan terdakwa tersebut saksi menjadi tambah takut dan hanya bisa diam, selanjutnya terdakwa.
- Bahwa korban NUR FITRI RAMADANI yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 2646/Ist/Cs-Mr/V/2004/2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, Drs. H. MUH. NAWAR, M.Si, dan anak NUR FITRI RAMADANI merupakan anak kandung dari Saksi BASRIA Binti BACO SELE berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7309112702120001, yang mana Saksi BASRIA Binti BACO SELE telah

menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/09/VI/2013

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NUR FITRI RAMADANI mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam NUR FITRI RAMADANI Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Psikologis yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 23 November 2017 oleh Tissa Wulandari, M.Psi., Psikolog selaku tenaga Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan kondisi psikologis yang dialami oleh saksi Nur Fitri Ramadhani adalah sebagai berikut : Subjek mendapatkan konseling berkelanjutan dan dibutuhkan dukungan keluarga yang penuh sampai kondisi subjek pulih. Subjek perlu menyibukan diri dengan berbagai aktivitas positif agar pikiran subjek dapat teralihkan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal dalam Undang-Undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan kepersidangan ini status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

1. Faktor Yang Memberatkan Terdakwa :

- a. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.
- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi korban.
- c. Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri korban yang seharusnya memberikan perlindungan .

2. Faktor Yang Meringankan Terdakwa :

- a. Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa.

C. Analisis Penulis

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum,terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,yakni :

Dakwaan pertama : Melanggar pasal 81 Ayat (3) jo.Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Ketiga : Pasal 46 Jo.Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh Karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo.Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (3) Jo.Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Akan tetapi menurut penulis, putusan yang dijatuhkan terhadap si pelaku Tuwo alias Tahir Bin Baco masih belum memenuhi rasa keadilan terlebih lagi korbannya merupakan anak dibawah umur, serta hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya :

1. Tidak ada sama sekali perihal yang ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa .
2. Menurut “Perppu No.1 Tahun 2016/UU RI No. 17 Tahun 2016 Pasal (82) dan (84).

-Pasal 82 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-Pasal 84 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,gangguan jiwa, penyakit menular,terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan /atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan dari korban (Anak) dan telah melakukan suatu bentuk kekerasan seksual terhadap anak berdasar dari surat *Visum Et Repertum* sesuai RSUD Salewangang Maros Nomor: 364/RSU SLWG/VER/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama NUR FITRI RAMADANI, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama.
4. Mengingat bahwa korban masih berusia 13 (tahun) berdasarkan akte kelahiran Nomor: 2646/Ist/Cs-Mr/V/2004/2007 yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros.

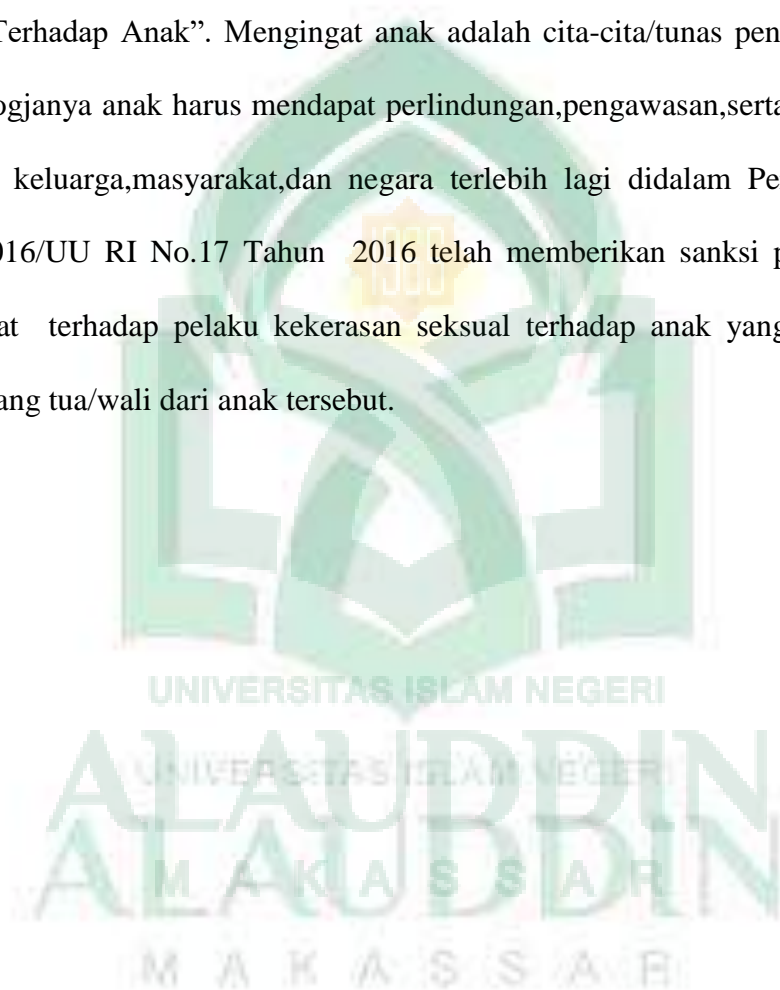
Menurut penulis pada Perppu No 1 Tahun 2016/UU RI No.17 Tahun 2016 bagi korban yang mengalami "*gangguan jiwa*" telah memenuhi unsur, akibat perbuatan pelaku yang dimana tertuang didalam putusan hakim dengan pertimbangan :

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NUR FITRI RAMADANI mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam NUR FITRI RAMADANI Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Psikologis yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 23 November 2017 oleh Tissa Wulandari, M.Psi.,Psikolog selaku tenaga Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan kondisi psikologis yang dialami oleh saksi NUR FITRI RAMADANI adalah sebagai berikut : Subjek mendapatkan konseling berkelanjutan dan dibutuhkan dukungan keluarga yang penuh sampai kondisi subjek pulih. Subjek perlu menyibukan diri dengan berbagai aktivitas positif agar pikiran subjek dapat teralihkan."

Bahwasanya gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung distress (penderitaan) dan menimbulkan hendaya (disabilitas) pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan,komunikasi,proses berpikir,interaksi, dan aktifitas sehari-harinya.⁶⁷

⁶⁷http://www.academia.edu/9232126/MAKALAH_ASKEP KEPERAWATAN_JIWA_DENGAN_MASALAH_WAHAM/ diakses pada tanggal 27 Desember 2018 ,pukul 05.40 Wita.

Berdasar dari hal tersebut ,maka penulis berpendapat bahwasanya penerapan hukum pidana materil yang diterapkan terhadap pelaku telah sesuai namun yang perlu dipertimbangkan adalah hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mengingat beberapa aturan yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil terhadap pelaku “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Mengingat anak adalah cita-cita/tunas penerus bangsa yang seyogjanya anak harus mendapat perlindungan,pengawasan,serta bimbingan baik dari keluarga,masyarakat,dan negara terlebih lagi didalam Perppu No. 1 Tahun 2016/UU RI No.17 Tahun 2016 telah memberikan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah orang tua/wali dari anak tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs di kota Maros telah sesuai,terdakwa telah terbukti telah melanggar unsur-unsur tindak pidana. Rumusan surat dakwaan telah memenuhi syarat, dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan(berkas P-21), kemudian oleh hakim menetapkan pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa Tuwo alias Tahir Bin Baco telah terbukti melanggar dakwaan Primair oleh jaksa penuntut umum yakni Melanggar pasal 81 Ayat (3) jo.Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs terhadap terdakwa

kurang tepat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih kurang mencerminkan rasa keadilan terhadap anak, Majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 15 (lima belas tahun) terhadap terdakwa Tuwo alias Tahir Bin Baco dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditambah lagi dengan diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2016 yang dimana seharusnya pelaku kekerasan terhadap anak utamanya kekerasan seksual terhadap anak haruslah dihukum berat agar dapat memberikan efek jera serta tidak ada lagi pelaku-pelaku lain dikemudian hari, akan tetapi putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka masih mengalami trauma dan rasa malu, serta akan merusak masa depan korban akibat peristiwa yang dialaminya.

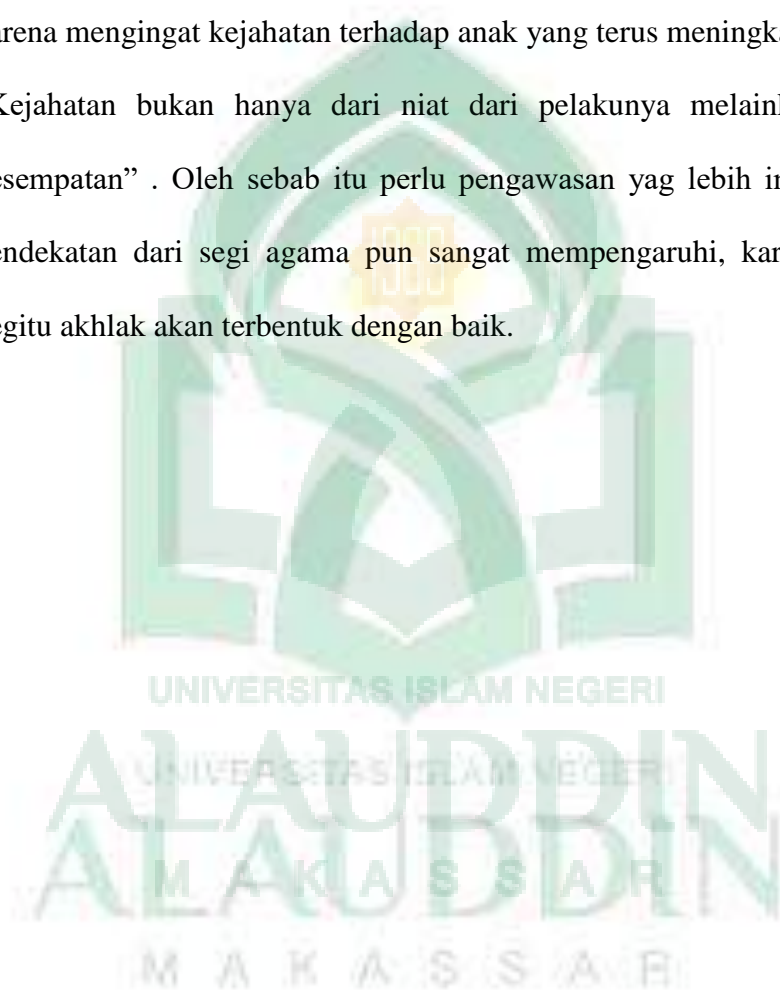
B. Implikasi

1. Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang di hadapkan dimeja persidangan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan dan ilmu hukum yang baik (*formil/materil*) agar tidak salah dalam menentukan perbuatan yang sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim, hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah senantiasa memberikan rasa keadilan bagi mereka yang

berperkara dan perlu memperhatikan lagi landasan yuridis yang digunakan.

3. Penulis berharap agar orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum haruslah meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak. Jangan sampai anak menjadi korban pelampiasan nafsu orang-orang yang tidak bermoral, karena mengingat kejahatan terhadap anak yang terus meningkat.

“Kejahatan bukan hanya dari niat dari pelakunya melainkan adanya kesempatan”. Oleh sebab itu perlu pengawasan yang lebih intensif serta pendekatan dari segi agama pun sangat mempengaruhi, karena dengan begitu akhlak akan terbentuk dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2002.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2005.

Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016.

Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Sinar Grafika, 2015.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

A.SR.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta, Cetakan ke-2), 1989.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2015.

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

H.Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016.

H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016.

H.Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.

Ismail Aris dan Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014.

Ismatullah Deddy, *Kriminologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2016.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Cet-2, Bandung, PT.Refika Aditam, 2010.

Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016.

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, PT.Balebat Dedikas Prima, 2017.

R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2010.

Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta , PT.Pranadya paramita, 2002.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Cet.2, Jakarta, Rajawali Pers, 2016).

Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko ,1984.

C. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

D. Internet

1. ArhamLatief, Kejahatan seksual terhadap anak dan contohnya (<http://core.ac.uk/download/pdf/25489860.pdf>) Tanggal akses 5 Oktober 2018 Pukul 20.30
2. Tribun News, pendapat Aries Merdeka Sirait dikutip dalam Jurnal *Komnas Anak* (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/komnas-pa-catat-63-persen-dari-1688-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-orang-dekat>. Tanggal) Akses 2 Desember 2018 Pukul 23.30 Wita.
3. [http://www.academia.edu/9232126/MAKALAH ASKEP KEPERAWATAN_JIWA_DENGAN_MASALAH_WAHAM/](http://www.academia.edu/9232126/MAKALAH_ASKEP KEPERAWATAN_JIWA_DENGAN_MASALAH_WAHAM/) diakses pada tanggal 27 Desember 2018 ,pukul 05.40 Wita.
4. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/5491> diakses pada tanggal 30 Desember 2018, Pukul 21.00 Wita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa
Tlp. (0411) 841878, Fax. (0411) 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 236 Tahun 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2018**

Menimbang :

- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Menunjuk saudara :
 1. Dr. Jumadi, S.H., M.H.
 2. St. Nurjannah, S.H., M.H.

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama	: Andi Mahfud Arya Wardana
NIM	: 10400115017
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: "Tinjauan Yuridis tindak Pidana Persetubuhan disertai Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan No.74/Pid.Susu/2016/Pn.Mks)."

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
- d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata, Gowa
12 November 2018

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa; (Sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax. 8221400

Nomor : B-3263 /SH.01/PP.00.9/12/2018
Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Samata Gowa 16 Desember 2018

**Kepada Yth :
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sulsel
di
Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Andi Mahfud Arya Wardana
Nim	: 10400115017
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: BTN Pao-Pao Permai

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana., dengan judul skripsi :

**"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan
terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan
No.74/Pid.Sus./2018/Pn.Mrs) "**

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Jumadi, S.H., M.H.
2. St. Nurjannah., S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di **Kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas I B**, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2018 s.d. 12 Januari 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Wassalam
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB.
Jalan DR.Ratulangi No.36 Kode Pos 90511
Telepon : 371317 FAX (0411) 371318

18 Desember 2018

Nomor : W22.U4/2425 /HK/XII/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian

KEPADA

Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Di – Makassar

Kami dari pihak Pengadilan Negeri Maros Kelas IB menyampaikan bahwa :

Nama : **ANDI MAHFUD ARYA WARDANA**
 NPM : 10400115017
 Konsentrasi Ilmu : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Samata Gowa

Telah melakukan penelitian untuk Penyusunan Skripsi di kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB khususnya yang berkaitan dengan **“Tinjauan Yuridisi Tindak Pidana Persetubuhan disertai Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan No.74/PID.SUS/2018/PN.MRS)”**.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB
 Panitera


MUHAMMAD SYAKIR SHLMI
 Nip.197012071992031001,-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 3084 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- | | |
|-------------------------------|--|
| Membaca | : Surat Permohonan
N a m a : Andi Mahfud Arya Wardana
N I M : 10400115017
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis 22 November 2018
Pihak : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persefubehan di Sertai Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan No. 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)." |
| Menimbang | : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Mandatantagari Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan
Perfama | : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Marliang, S.H., M.Hum
Penguji II : Istiqamah, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Ilian Asnan, S.E., M.A.
2. Herawati, S.H. |
| Kedua | : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi |
| Ketiga | : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018; |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata Gowa
pada tanggal 22 November 2018
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621020 199003 1 003

Tembusan :

- Yth Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2019

T E N T A N G

**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca :** Surat Permohonan
- N a m a :** Andi Mahfud Arya Wardana
- N I M :** 10400115017
- Jurusan :** Ilmu Hukum
- Hari/Tanggal :** Kamis, 10 Januari 2019
- Prihal :** Ujian Seminar Hasil/Skripsi
- Judul :** "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persefubehan dengan Kekerasan Disertai Ancaman Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan No. 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)"
- Menimbang :**
- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 - Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua :** Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
- Sekretaris :** Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
- Penguji I :** Dr. Marlang, S.H., M.Hum
- Penguji II :** Istiqamah, S.H., M.H.
- Pelaksana :** 1. Mujahidah, S.E
2. Herawati, S.H.
- Kedua :** Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : Januari 2019
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Andi Mahfud Arya Wardana
 NIM : 10400115017
 JURUSAN : Ilmu Hukum
 JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan Disertai Ancaman Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan No. 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	Ketua	1.
2.	Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Pembimbing	3.
4.	ST. Nurjannah, S.H., M.H.	Pembimbing	4.
5.	Dr. Marilang, S.H., M.Hum	Penguji	5.
6.	Istiqamah, S.H., M.H.	Penguji	6.
7.	Mujahidah, S.E	Pelaksana	7.
8.	Herawati, S.H.	Pelaksana	8.
9.	Andi Mahfud Arya Wardana	Mahasiswa	9.

Samata Gowa, 10 Januari 2019

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
 NIP : 19621016 199003 1 003

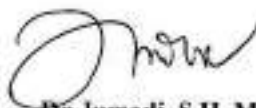
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ANDI MAHFUD ARYA WARDANA**, **NIM: 10400115017**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Disertai Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri(Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)**", Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Desember 2018

Pembimbing I



Dr. Jumadi, S.H., M.H
NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II



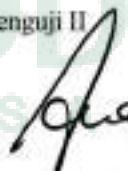
St. Nurjannah, S.H., M.H
NIP. 19760822 200312 2 003

Penguji I



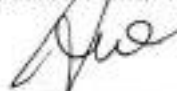
Dr. Marilang, S.H., M.H
NIP. 19621231 199303 1 024

Penguji II



Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 196801120 199503 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 196801120 199503 2 001

DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI (S1)

Nama : Andi Mahfud Arya Wardana
 Nim : 10400115017
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul skripsi : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No. 74/ Pid.Sus/2018/PN.Mrs)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Ketua	1.
2.	Dr. H. Abd. Halim Telli, M.Ag	Sekretaris	2.
3.	Dr. Jumadi, S.H., M.H	Pembimbing	3.
4.	ST. Nurjannah, S.H., M.H	Pembimbing	4.
5.	Dr. Marliang, S.H., M.Hum	Penguji	5.
6.	Istiqamah, S.H., M.H.	Penguji	6.
7.	Muh. Amzar, S.Ag	Pelaksana	7.
8.	Andi Mahfud Arya Wardana	Mahasiswa	8.

Samata Gowa, Juni 2019
 Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
 NIP : 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus II, Jl.H.M. Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

BERITA ACARA UJIAN/MUNAQASYAH SKRIPSI DAN YUDISIUM

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **25 Juni 2019** pukul **10.00** sampai selesai berdasarkan surat Keputusan tentang Ujian Akhir / Munaqasyah Skripsi dan yudisium Nomor **1054 Tahun 2019** telah dilaksanakan Ujian Akhir/Munqasyah Skripsi dan Yudisium terhadap mahasiswa :

Nama : Andi Mahfud Arya Wardana
Nim : 10400115017
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul skripsi : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No. 74/ Pid.Sus/2018/PN.Mrs)"

Dengan hasil ujian sebagai berikut :

Kategori :
Nilai :
Predikat :

Berdasarkan hasil ujian di atas maka atas nama dekan, Ketua Ujian Akhir/Munqasyah Skripsi menyudisium saudara **Andi Mahfud Arya Wardana**

Berita acara ini di tandatangani Ketua dan sekretaris Ujian, Penguji, Pembimbing, Pelaksana dan Mahasiswa teruji .

Samata Gowa, 25 Juni 2019

Ketua : Prof. Dr. Darusalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Pembimbing I : Dr. Jumadi, S.H., M.H
Pembimbing II : ST. Nurjannah, S.H., M.H
Penguji I : Dr. Marilang, S.H., M.Hum
Penguji II : Istiqamah, S.H., M.H.
Pelaksana I : Muh. Amzar, S.Ag
Mahasiswa : Andi Mahfud Arya Wardana

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Musihat Terhadap Anak(Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)”** memiliki nama lengkap Andi Mahfud Arya Wardana, Nim : 10400115017, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Drs.Andi Muhammad Asri

dan ibu Sitti Rukiya.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal Di TK Aisyiah Bustanul Athfal pada tahun 2003-2004, berlanjut ke SD Negeri 221 Tanah Kong-Kong pada tahun 2004-2009, setelah itu masuk ke SMP Negeri 1 Bulukumba pada tahun 2009-2012, sampai penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bulukumba pada tahun 2012-2015, dan setelah tamat kemudian selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar melalui jalur SPAN PTKIN dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2019.

Selama menyandang status sebagai mahasiswa Hukum, penulis aktif diberbagai organisasi kampus baik ekstra maupun intra ,seperti halnya pernah menjadi Pengurus HMJ (Kabid Advokasi dan Humas) Ilmu Hukum periode 2017-2018, pada tahun yang sama penulis juga menjabat sebagai pengurus IPPS(Ikatan

Penggiat Peradilan Semu) UIN Alauddin Makassar sebagai Kabid Kaderisasi pada periode 2016-2017, selain itu penulis yang tergabung didalam salah satu Organisasi Daerah KKMB (Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba) ditahun 2015 pernah juga menjabat sebagai Kabid Keilmuan pada kepengurusan periode 2018-2019 .

Demikian riwayat hidup singkat penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di mulai pada tahun 2015-2019 yang tertuang didalam Skiripsi.

